BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

IV.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan gambaran kinerja pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah yang relevan.

IV.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

IV.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia dapat dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang secara umum memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas. Salah satu indikator yang banyak digunakan dalam mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli.

Meski nilai IPM Kota Surabaya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun apabila dicermati lebih jauh, diketahui masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sehingga penyakit menular seperti demam berdarah, ISPA, diare, masih cukup banyak ditemukan di lingkungan masyarakat kota. Perkembangan nilai IPM Kota Surabaya dari tahun 2011–2015 sebagaima tabel IV.1

Tabel IV.1
Perkembangan IPM dan Reduksi *Shortfall*
Kota Surabaya Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	IPM Surabaya	77,85	**78,33**	**78,97**	78,87	79,47

Sumber : BPS Kota Surabaya, April 2015

IV.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mengingat jumlah penduduk Kota Surabaya didominasi oleh penduduk usia produktif, maka ketersediaan lapangan kerja menjadi indikator yang penting, di samping mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat usia produktif.

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,01%. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain, yaitu:

1. Faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi disertai tingkat urbanisasi yang tinggi yang tidak diimbangi dengan luasnya lapangan kerja yang tersedia.
2. Tren pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum diiringi oleh penurunan angka pengganggguran. Hal tersebut terjadi karena kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya terbesar ditopang oleh sektor *non tradable* (sektor yang tidak menyerap tenaga kerja banyak) dan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja semakin rendah.
3. Masih besarnya proporsi tenaga kerja *unskill* dengan tingkat pendidikan rendah di Kota Surabaya mendorong masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya serta akan meningkatkan keberadaan sektor informal.
4. Masih ketatnya peraturan terkait ketenagakerjaan seperti kenaikan UMK setiap tahun atau pemberian pesangon membuat pelaku usaha lebih

berorientasi melakukukan investasi padat modal dibandingkan dengan padat karya.

Tabel IV.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	75.954	71.997	77.861	85.345	102.914
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.475.147	1.419.677	1.473.465	1.465.502	1.468.094
3	% pengangguran terbuka	5,15%	5,07%	5,28%	5,82%	7,01%

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2015

IV.1.1.3 Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota

Stabilitas keamanan daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh seorang investor apabila hendak melakukan investasi di suatu wilayah. Frekuensi terjadinya demonstrasi merupakan indikasi bahwa potensi terjadinya masalah ketertiban yang berdampak pada masalah ketentraman masyarakat kota cukup tinggi. Jumlah demonstrasi yang terjadi di Kota Surabaya selama kurun waktu 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada tabel IV.3

Tabel IV.3
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang politik	35	31	32	86	90
2	Ekonomi	54	116	122	91	126
3	Kasus pemogokan kerja	40	84	81	63	115
4	Jumlah unjuk rasa	129	231	235	240	331

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2015

Meski demonstrasi yang terjadi tidak menimbulkan kerusuhan dan cenderung kondusif, namun upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya

konflik di masyarakat yang memicu terjadinya demonstrasi merupakan permasalahan yang harus diantisipasi secara dini oleh Pemerintah Kota Surabaya.

IV.1.1.4 Indeks Gini

Besaran ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surabaya yang diukur melalui Indeks Gini pada tahun 2013 adalah sebesar 0,37. Berdasarkan nilai tersebut maka Kota Surabaya dikategorikan memiliki ketimpangan distribusi pendapatan sedang (berada antara 0,3-0,5). Dalam hal pengkategorian tersebut, ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2012, namun nilai Indeks Gini tahun 2013 lebih baik dari tahun 2012 yang sebesar 0,40.

Sebagaimana yang diketahui rata-rata pengeluaran per kapita Kota Surabaya merupakan yang tertinggi di Jawa Timur, namun capaian yang tinggi tersebut tidak dapat dikatakan baik jika besaran pengeluaran didominasi dari kelompok pengeluaran tertentu saja, dengan kata lain bisa jadi rata-rata pengeluaran per kapita yang tinggi tersebut berasal dari pengeluaran yang dihasilkan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi (kaya) sedangkan pengeluaran yang dihasilkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap rata-rata pengeluaran per kapita secara keseluruhan. Jika hal tersebut yang terjadi, maka dapat dipastikan di Kota Surabaya terdapat kesenjangan/ketimpangan pendapatan.

Tabel IV.4
Gini Ratio Kota Surabaya
Tahun 2011 – 2014

Tahun	2011	2012	2013	2014
Gini Ratio	0,37	0,40	0,37	0,39

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

IV.1.1.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat. IPG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam

kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan. Namun demikian, dari aspek kualitas masih banyak yang perlu untuk dipertimbangkan.

Capaian IPG Kota Surabaya pada tahun 2011 mencapai 77,09%. Selanjutnya sampai dengan tahun 2014 terus mengalami peningkatan dan mencapai 81,93%. Dengan peningkatan IPG dikota Surabaya menunjukkan bahwa peranan wanita dalam pengambilan keputusan menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam rangka meningkatkan IPG maka diperlukan arahan kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan. Secara lengkap perkembangan IPG Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Surabaya Tahun 2011-2014

Tahun	2011	2012	2013	2014
Nilai IDG (%)	77,09	78,02	79,42	81,93

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2015

IV.1.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)

Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota dimana proyeksi volume produksi sampah Kota Surabaya meningkat pada tahun 2011 sebanyak 9.677.83 m^3/hari, dan pada tahun 2015 menjadi sebanyak 9.475,21 m^3/hari. Masih besarnya volume sampah memerlukan peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Selain permasalahan persampahan, permasalahan tentang kualitas air dan kualitas udara menjadi prioritas yang hendak diselesaikan oleh

Pemerintah Kota. Kualitas air di Kota Surabaya belum dapat dikatakan baik, mengingat posisi sungai di Kota Surabaya berada di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, sehingga rawan terjadi penurunan kualitas air. Selain kualitas air, rendahnya kualitas udara di Kota Surabaya menjadi salah satu permasalahan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Secara umum masih belum optimalnya kualitas udara Kota dipicu oleh meningkatnya aktivitas transportasi dan industri.

Penyelesaian ketiga permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai indikator. Nilai IKLHS Kota Surabaya cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2013 nilai sebesar 51,91 sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 56,42. Pada tahun 2015, indeks persampahan telah dijadikan variabel penghitung nilai IKLHS, sehingga nilai IKLHS pada tahun tersebut mencapai 59,18. Data IKLHS disajikan pada table berikut:

Tabel IV.6
IKLHS Kota Surabaya tahun 2013-2015

Tahun	2013	2014	2015
IKLHS	51,91	56,42	59,18

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Surbaya, 2016

IV.1.1.7 Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh

Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu kebijakan prioritas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota. Bentuk implementasi dari kebijakan tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan yang juga ditujukan untuk mendukung program nasional 100-0-100, seperti peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Meski telah dilakukan secara berkelanjutan, namun keberhasilan upaya penanganan kawasan permukiman kumuh diantaranya sangat dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor eksternal seperti meluasnya

lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan, yang salah satunya dipicu oleh tingginya angka urbanisasi. Faktor lain yang harus diantisipasi terkait penanganan kawasan permukiman kumuh adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

IV.1.1.8 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Meski menunjukkan peningkatan tingkat akuntabilitas kinerja selama kurun waktu empat tahun terakhir, namun perwujudan level akuntabilitas kinerja sangat baik tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Pemerintah Kota.

Tabel IV.7
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	-	C	CC	CC	B
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	-	47,71	52,34	57,48	60,20

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015

IV.1.1.9 Nilai Kepuasan Masyarakat

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dilaksanakan setiap tahun. Meskipun trend angka SKM untuk tiga periode terakhir menunjukkan peningkatan, namun upaya menjaga atau meningkatan kualitas pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota.

Tabel IV.8
Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya
Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	78,21	77,53	77,60	77,13	78,29

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015

IV.1.1.10 Indeks Ketimpangan Wilayah

Nilai Indeks Williamson selama periode 2011-2013 menunjukkan trend peningkatan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa disparitas pendapatan antar kecamatan di Kota Surabaya mempunyai trend semakin melebar. Pada perspektif lain disparitas yang terjadi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi antar kecamatan tidak merata.

Tabel IV.9
Besaran Indeks Williamson (CV_w) dan Perubahannya
Tahun 2011-2013

Tahun	Indeks CV_W	Perubahan
2011	0.82880	0.00480
2012	0.82921	-0.00041
2013	0.83273	-0.00035

Sumber: Bappeko Surabaya, 2016

IV.1.1.11 Indeks Budaya Lokal

Meningkatnya intensitas interaksi budaya di era global pada sisi yang lain berpotensi menjadi ancaman bagi hilangnya kearifan budaya lokal kota. Infiltrasi budaya global apabila tidak segera dicegah, secara perlahan akan menggantikan nilai-nilai gotong royong, *tepo sliro* atau kearifan lokal lain yang selama ini menjadi kekuatan dan identitas budaya warga kota. Pengukuran indeks budaya lokal merupakan cerminan dari kinerja variabel-variabel yang mempunyai korelasi dengan kearifan lokal kota, seperti: pelestarian budaya lokal, peningkatan minat baca dan wawasan kebangsaan warga kota.

IV.1.1.12 Pertumbuhan Ekonomi

Selama 5 tahun terakhir perekonomian Surabaya mampu tumbuh stabil di kisaran 6% hingga 7%. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami perlambatan sejak tahun 2014 dan 2015 yang berada dikisaran 6%, namun perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi global. Tren perlambatan ini juga terjadi baik pada tingkat Jawa Timur dan Nasional seperti nampak pada tabel IV.10 dibawah ini.

Tabel IV.10
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2011-Tahun 2015

Pertumbuhan Ekonomi	2011	2012	2013	2014	2015*
Surabaya (%)	7,13	7,35	7,58	6,73	5,97
Jawa Timur (%)	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44
Nasional (%)	6,46	6,23	5,78	5,02	4,79

Sumber: BPS Kota Surabaya,2015 *) Angka Sementara

Meski capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selalu diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional, namun kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi belum diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi,
2. Pertumbuhan ekonomi belum menstimulasi terjadinya pemerataan pendapatan antar wilayah yang ditunjukkan oleh indeks ketimpangan wilayah yang masih tinggi yaitu 0,83 yang mendekati angka satu, yang artinya tingkat kesenjangan wilayah cukup tinggi.
3. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang tinggi terbesar ditopang oleh kategori lapangan usaha, *nontradable* (sektor yang tidak menyerap tenaga kerja banyak) dan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja semakin rendah.
4. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih belum mampu berkontribusi dalam permasalahan pengentasan kemiskinan

IV.1.1.13 Tingkat Pertumbuhan Volume Komoditi Keluar Masuk Kota Surabaya

Upaya peningkatan volume arus komoditas keluar masuk Kota Surabaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk mengintegrasikan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota (*city logistic)*, namun demikian masih berfluktuasinya tren kinerja ekspor Kota Surabaya selama kurun waktu 2011-2015, sebagaimana terlihat pada tabel IV.11 merupakan permasalahan dibidang perdagangan yang harus dapat diantisipasi Pemerintah Kota Surabaya untuk kurun waktu 5 tahun mendatang.

Tabel IV.11
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2011- 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Nilai Ekspor (US $)	17.545.307.329	15.448.541.322	14.898.848.075	18.022.413.011	16.452.486.419
2	Nilai Impor (US $)	15.971.249.647	16.852.596.453	17.303.578.574	17.056.615.375	14.888.180.928
3	Nilai Ekspor Bersih (US $)	1.574.057.682	(1.404.055.130)	(2.404.730.499)	965.797.636	1.564.305.491

Sumber: Bank Indonesia, 2015

IV.1.2 Identifikasi Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

IV.1.2.1 Pendidikan

Gambaran dari kualitas pelayanan pendidikan di Kota Surabaya secara umum dapat tercermin dari kinerja pelayanan fasilitas penunjang pendidikan. Jenis fasilitas pendidikan yang ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).

Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kualitas layanan pendidikan

Permasalahan mengenai kualitas layanan pendidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional;
2. Pemenuhan dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan;
3. Kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar;
4. Pendidikan yang mendorong daya inovasi dan kreativitas;
5. Pendidikan karakter dan pendidikan entrepreneur
6. Sistem manajemen dan tata kelola fasilitas pendidikan;
7. Sinkronisasi antara kurikulum di dunia pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.

b. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan

Permasalahan mengenai ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

c. Kerjasama penyelenggaraan pendidikan

Permasalahan mengenai kerjasama penyelenggaraan pendidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi pemerintah;
2. Keterbatasan dan kesenjangan kapasitas daerah dalam pengelolaan pendidikan;
3. Kerjasama dengan pihak luar negeri, dunia swasta, media serta pemerintah daerah dan stakeholder lainnya;
4. Keakuratan data pendidikan dalam menunjang perencanaan kebijakan yang tepat sasaran.

IV.1.2.2 Kesehatan

Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kota Surabaya secara umum dapat tercermin dari kinerja pelayanan fasilitas penunjang pendidikan dan kesehatan. Terkait pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan baik berupa puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), maupun Rumah Sakit (RS).

Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan kesehatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kesehatan lingkungan dan masyarakat

Permasalahan mengenai kesehatan lingkungan dan masyarakat meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
2. Pencegahan penyakit akibat dampak dari kualitas lingkungan, perilaku konsumsi serta jenis makanan.

b. Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan

Permasalahan mengenai aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aksesiblitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan, serta sistem informasi kesehatan;
2. Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, ibu dan lansia;
3. Efektivitas pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan;
5. Pengendalian penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya, serta penyebaran HIV/AIDS dan NAPZA.

c. Ketersediaan, standardisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan

Permasalahan mengenai ketersediaan, standardisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan meliputi beberapa aspek berikut:

1. Kerjasama pengembangan bidang kesehatan dengan seluruh stakeholder dalam dan luar negeri;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.

IV.1.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki rencana umum tata ruang kota berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Sebagai pedoman operasional pembangunan dan pendetailan dari rencana umum tata ruang, Pemerintah Kota Surabaya saat ini sedang menyusun rencana rinci tata ruang kota berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang juga memuat pedoman peraturan zonasi serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu adanya integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana sektoral dan sistem pertanahan untuk menjamin keselarasan dan sinergi dalam pemanfaatan dan pengendalian pembangunan kota.

Pada sektor sarana prasarana pematusan, saluran-saluran di Kota Surabaya pada awalnya dirancang untuk sistem irigasi. Namun seiring dengan perkembangan kota, maka sistem saluran irigasi tersebut beralih fungsi menjadi saluran drainase. Karena konstruksi saluran irigasi yang berbeda dengan prinsip konstruksi saluran drainase, maka untuk mengoptimalkan sistem drainase kota diperlukan normalisasi saluran agar dapat berfungsi dengan baik.

Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan PU dan Penataan Ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana tata ruang yang dapat diterapkan sebagai pedoman pembangunan kota

Permasalahan mengenai penyusunan rencana tata ruang adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Integrasi infrastruktur, sarana/prasarana publik, penataan bangunan dan lingkungannya dengan rencana tata ruang kota;
3. Peran *stakeholder* dalam penataan ruang wilayah;
4. Perkembangan Kota Surabaya berdampak terhadap daerah sekitarnya dan mengakibatkan terjadinya gejala konurbasi/aglomerasi*;*
5. Konsep pengembangan antar-wilayah secara terpadu untuk mewujudkan interaksi yang saling mendukung;

b. Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan

Permasalahan mengenai pada sistem drainase pematusan di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Beberapa saluran irigasi yang belum beralih fungsi menjadi saluran drainase;
2. Posisi Kota Surabaya yang berada di pesisir pantai mengakibatkan sistem jaringan drainase kota dipengaruhi oleh pasang surut air laut;
3. Pengembangan permukiman belum diimbangi dengan ketersediaan sistem drainase yang memadai.

c. Peningkatan Pelayanan Utilitas Kota

Permasalahan yang dihadapi terkait pelayanan utilitas meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

c.1 Pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat

Permasalahan mengenai pelayanan air bersih/air minum meliputi beberapa hal antara lain:

1. Pemenuhan kapasitas produksi dengan optimalisasi*idle capacity* dan penurunan kebocoran pada pemanfaatan sumber air baku kali Surabaya, mata air umbulan untuk mendukung *universal access* pemenuhan target 100 % pelayanan air bersih.
2. Penambahan tekanan air pada Sambungan Pelanggan melalui pembangunan reservoir distribusi/pelayanan;
3. Pengembangan sistem jaringan air bersih, terutama pada kawasan-kawasan pemanfaatan terbatas, antara lain KAI, Sempadan Sungai, Pelindo, dsb.

c.2 Pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata

Permasalahan mengenai pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) meliputi beberapa aspek seperti:

1. Pemerataan pemasangan PJU;
2. Biaya pemeliharaan dan operasional PJU;
3. Pengembangan PJU dengan memanfaatkan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan;
4. Kualitas sistem manajemen pemeliharaan dan operasional PJU

c.3 Perwujudan utilitas kota lainnya yang terpadu dan efisien

Permasalahan mengenai perwujudan utilitas kota lainnya meliputi beberapa hal antara lain:

1. Penataan dan pengendalian pembangunan jaringan utilitas yang sesuai dengan rencana tata ruang dan estetika kota;
2. Diperlukannya prasarana pendukung utilitas agar tercipta keterpaduan dalam penempatan jaringan utilitas.

IV.1.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kegiatan manusia yang semakin kompleks pada kawasan perkotaan. Permasalahan perumahan dan permukiman yang layak dan berkualitas meliputi beberapa aspek seperti:

1. Kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Layanan sarana dan prasarana pada perumahan dan permukiman khususnya untuk mendukung *universal access* pemenuhan target 0% permukiman kumuh dan 100 % sanitasi.

IV.1.2.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) merupakan upaya mengondisikan lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini guna

mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk dapat hidup tertib dan tenteram.

Secara lebih spesifik permasalahan terkait keamanan dan ketertiban meliputi beberapa aspek permasalahan, yaitu:

1. Kerjasama dengan berbagai pihak hingga di tingkat RT/RW untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban.
2. Membangkitkan kembali karakter peduli, toleransi, menghargai, dan perilaku gotong-royong.

IV.1.2.6 Sosial

Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan Sosial meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. PMKS urban dari luar Kota Surabaya
2. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana prasarana panti sosial bagi PMKS;
4. Adanya kelompok PMKS yang tidak dapat diberdayakan;
5. Keakuratan database PMKS dalam menunjang perencanaan kebijakan yang tepat sasaran;
6. Sinkronisasi program penanganan PMKS;
7. Kerjasama dengan stakeholder, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

IV.1.2.7 Tenaga Kerja

Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan dalam menyongsong pemberlakuan MEA adalah penyiapan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, utamanya sumber daya manusia yang akan masuk dalam bursa kerja. Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya mengurangi pengangguran dengan memfasilitasi pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan softskill, bursa kerja dan sebagainya.

Secara lebih spesifik permasalahan aspek ketenagakerjaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kualitas dan daya saing angkatan kerja

Permasalahan mengenai peningkatan kualitas angkatan kerja meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kualitas, produktivitas, serta kompetensi sesuai bidang keilmuan dan/atau bidang kerja yang digeluti;
2. Sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan, dan kreativitas serta berdaya saing tinggi;
3. Ketersediaan pasar tenaga kerja dan persaingan antar tenaga kerja dan dengan tenaga kerja asing.

b. Perluasan lapangan kerja bagi warga kota

Permasalahan mengenai perluasan lapangan kerja bagi warga kota meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tidak seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah pencari kerja yang masih tersisa;
2. Peningkatan kompetensi, kreativitas, kemandirian, dan kewirausahaan untuk mengurangi jumlah pencari kerja.

c. Hubungan industrial yang harmonis

Permasalahan hubungan antar pemangku kepentingan di atas meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja;
2. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
3. Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta hubungan industrial;
4. Integrasi data kependudukan dengan data ketenagakerjaan.

IV.1.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak meliputi dua bagian penting, yaitu peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beberapa aspek yang meliputi antara lain:

1. Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
2. Pemantauan teknologi informasi yang sehat bagi anak
3. Kesehatan reproduksi;
4. Pencegahan penyakit akibat pola hidup;
5. Kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan pada berbagai tindak kekerasan;
6. Kualitas hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Ketahanan keluarga, agama, ekonomi, sosial dan budaya;
8. Partisipasi perempuan di Kota Surabaya agar berdaya secara ekonomi.
9. Perlindungan orang tua *(senior citizen).*

IV.1.2.9 Pangan

Terkait dengan upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok;
2. Kualitas pangan dan bahan pokok yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat.

IV.1.2.10 Pertanahan

Permasalahan mengenai ketersediaan lahan aset untuk pembangunan bagi kepentingan umum meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Pengelolaan, peningkatan serta pengawasan kekayaan daerah
2. Pengamanan aset milik pemerintah kota untuk kepentingan pembangunan
3. Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum non infrastruktur.

IV.1.2.11 Lingkungan Hidup

Sistem Penanggulangan Bencana Kawasan Perkotaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada prinsipnya mengatur tentang perwujudan penataan ruang melalui sistem mitigasi bencana khususnya terkait dengan pengendalian dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pelaksanaan pembangunan.

Penanggulangan Bencana Kebakaran, Kebersihan, RTH, dan Lingkungan Hidup secara spesifik mengatur tentang perwujudan penataan ruang melalui kualitas lingkungan hidup kota. Adapun beberapa permasalahan terkait dengan aspek tersebut meliputi:

a. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran yang antisipatif dan tanggap

Permasalahan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut meliputi beberapa aspek seperti:

1. Aksesibilitas evakuasi pada sekitar area kejadian kebakaran;
2. Penerapan standar keamanan bangunan khususnya proteksi kebakaran;
3. Sarana prasarana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
4. Pemahaman masyarakat terhadap wawasan pencegahan dan penanggulangan/penanganan awal bencana kebakaran.

b. Sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Permasalahan mengenai penyediaan sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan tersebut meliputi beberapa aspek seperti:

1. Pengelolaan dan pengolahan sampah baik skala kota maupun regional;
2. Sarana prasarana dalam upaya pengelolaan dan pengolahan sampah;
3. Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kebersihan;
4. Peraturan atau regulasi terkait kebersihan kota.

c. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) agar berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika dengan sistem manajemen pengelolaan yang berkualitas

Permasalahan mengenai pengelolaan RTH tersebut meliputi beberapa aspek seperti:

1. Ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam;
2. Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
3. Kualitas dan fungsi ruang terbuka hijau yang belum optimal;
4. Partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau;
5. Kualitas sistem manajemen pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
6. Jenis dan karakter vegetasi yang sesuai dengan kondisi Kota Surabaya.

d. Pengendalian pencemaran lingkungan

Permasalahan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan meliputi beberapa aspek seperti:

1. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2. Upaya pelestarian lingkungan;
3. Sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik dan industri rumah tangga;
4. Pengelolaan dan pengawasan limbah industri dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5. Adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

e. Pemanfaatan Energi

Permasalahan mengenai pemanfaatan energi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Konservasi energi dan pengembangan energi alternatif.
2. Penyediaan infrastruktur yang berbasis ekologi.
3. Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

IV.1.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan upaya perwujudan tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:

1. Penataan dan pengelolaan kearsipan;

2. Sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan;
3. Peran dan fungsi strategis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam perencanaan pembangunan.

IV.1.2.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:

1. Data sektoral pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana (KB);
2. Kesesuaian minat dan kebutuhan pasar dengan jenis pemberdayaan yang diberikan;
3. Metode pelatihan yang mendorong inovatif dan daya saing;
4. Aksesibilitas pengembangan usaha skala mikro.

IV.1.2.14 Perhubungan

Kota Surabaya memiliki sistem jaringan jalan dengan bentuk semi grid, dengan pusat-pusat pertumbuhan primer dan sekunder terbesar berada di pinggir kota yaitu berada di koridor utara dan selatan serta timur dan barat kota.

Permasalahan mengenai pembangunan dan pengembangan sistem transportasi meliputi:

a. **Pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda**

   Permasalahan mengenai pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan tersebut meliputi :

   1. Angkutan massal berbasis rel (MRT/LRT) yang terintegrasi dan infrastuktur pendukungnya;
   2. Penyediaan angkutan umum yang murah, nyaman, aman, terintegrasi, menjangkau seluruh wilayah Surabaya dan terjadwal;
   3. Penggunaan kendaraan pribadi dan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum.

b. Penyediaan dan penuntasan pembangunan jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan kapasitas jalan yang memadai

Permasalahan mengenai penyediaan dan penuntasan pembangunan jaringan jalan tersebut meliputi:

1. Kemacetan lalu lintas pada beberapa kawasan terutama pada saat jam sibuk;
2. Tingkat aksesibilitas antar kawasan;
3. Pembangunan jaringan dan kapasitas jalan yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan jumlah kendaraan;
4. Ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan;
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi/stakeholder dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;

c. Sistem manajemen transportasi yang berkualitas

Permasalahan mengenai sistem transportasi tersebut meliputi :

1. Integrasi sistem transportasi antar wilayah untuk angkutan penumpang maupun barang;
2. Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang tertib dan aman;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas sistem transportasi.

IV.1.2.15 Komunikasi dan Informatika

Dalam memberikan pelayanan publik untuk masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan ini diwujudkan melalui pembangunan berbagai macam sistem informasi untuk penyediaan pelayanan publik yang dapat diakses secara *online* oleh masyarakat. Tidak terbatas hanya pada pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan juga diberikan pada berbagai layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penegakan yustisi sampai dengan penanggulangan bencana.

Meskipun demikian, pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik juga tidak luput dari masalah. Dalam proses pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat sejumlah permasalahan pada aspek-aspek sebagai berikut:

a. Perwujudan pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat

Pembahasan mengenai perwujudan pelayanan publik berbasis TIK meliputi beberapa aspek bahasan seperti yang dapat dilihat pada poin berikut:

1. Pengembangan Sistem Pelayanan publik administratif yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi;
2. Peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin akses informasi yang cepat dan aman;
3. Pemerataan akses internet untuk masyarakat;
4. Pengendalian dan integrasi seluruh aplikasi yang dijalankan oleh pemerintah kota Surabaya;

b. Penyediaan Infrastruktur TIK

Permasalahan mengenai penyediaan infrastruktur TIK meliputi:

1. Penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik;
2. Pengelolaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik.

IV.1.2.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Daya saing ekonomi lokal kota antara lain tercermin dari kinerja pelaku sektor usaha, jasa dan industri di semua skala dan bidang usahanya. Peningkatan jumlah koperasi aktif dan produktivitas sektor riil merupakan salah satu indikasi bahwa perkembangan aktivitas ekonomi lokal berada pada arah yang tepat.

Secara spesifik permasalahan di sektor koperasi dan UKM berkaitan dengan kualitas kelembagaan koperasi dan perkembangan volume usaha, yaitu:

1. Minat warga usia produktif untuk berwirausaha;
2. Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil;
3. Kompetensi dan daya saing koperasi serta pelaku usaha mikro;
4. Dukungan terhadap pengembangan usaha kreatif;
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok belum berorientasi pada penciptaan daya saing usaha;
6. Partisipasi masyarakat dalam berkoperasi.

IV.1.2.17 Penanaman Modal

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Penanaman Modal berkaitan dengan upaya peningkatan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:

1. Pemetaan dan promosi potensi investasi;
2. Mempertahankan iklim investasi yang kondusif;
3. Pengembangan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK.
4. Ketersediaan dan dukungan infrastruktur dan energi;

IV.1.2.18 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral dan kontrol norma sosial. Oleh sebab itu generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian baik, semangat nasionalisme, berjiwa pelopor serta mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk dapat ikut berperan dalam proses pembangunan.

Capaian prestasi olahraga menjadi kebanggaan bagi suatu daerah. Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk meningkatkan capaian prestasi olahraga dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga maupun melakukan kegiatan pelatihan terhadap pelatih dan atlit.

Permasalahan aspek kepemudaan dan olahraga dapat dikelompokan sebagai berikut:

a. Peran pemuda sebagai penggerak pembangunan dan pencapaian prestasi olahraga

Permasalahan mengenai peran pemuda sebagai penggerak pembangunan dan pencapaian prestasi olahraga meliputi:

1. Daya saing pemuda dalam menghadapi MEA
2. Sebaran dan kualitas sarana dan prasarana olahraga
3. Pembinaan dan pengembangan tenaga atlit dan pelatih profesional

b. Pengaruh negatif globalisasi, krisis budaya dan moral

Permasalahan mengenai pengaruh negatif globalisasi, krisis budaya dan moral meliputi:

1. Pemanfaatan Teknologi informasi yang sehat

2. Bahaya narkoba dan pergaulan bebas
3. Bahaya aksi terorisme
4. Keterlibatan peran keluarga dan penerapan norma-norma agama.

IV.1.2.19 Statistik

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Statistik berkaitan dengan upaya perwujudan tata kelola data dan informasi yang baik, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut adalah Penyediaan data statistik daerah (kota) yang dapat dipertanggung jawabkan, aman, dan update.

IV.1.2.20 Kebudayaan

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jumlah grup kesenian yang terdaftar di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari 183 grup pada tahun 2012 menjadi 203 grup pada tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 226 grup kesenian pada tahun 2014. Sedangkan di tahun 2015 grup kesenian yang terdaftar sebanyak 641 grup kesenian. Disamping itu Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan gedung kesenian agar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk melakukan kegiatan berkesenian. Gedung kesenian yang dimiliki pemerintah kota Surabaya sebanyak 4 gedung, yaitu Gedung Pringgodani, Gedung Srimulat dan Gedung Ludruk yang terletak di UPTD THR serta gedung Balai Budaya yang terletak di UPTD Balai Pemuda.

Secara lebih spesifik permasalahan terkait budaya dan tradisi lokal mencakup penggalian dan penguatan budaya lokal, meliputi:

1. Pelestarian Warisan Budaya;
2. Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya;
3. Pengembangan pusat-pusat kebudayaan;
4. Pengembangan kearifan budaya lokal yang berkarakter dan berkepribadian;
5. Pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan pada generasi muda.

IV.1.2.21 Perpustakaan

Dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di

Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos, Terminal.

Secara lebih spesifik permasalahan terkait budaya baca mencakup upaya perwujudan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca, meliputi:

1. Pembudayaan gemar membaca;
2. Sarana dan prasarana perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat (TBM).

IV.1.2.22 Kearsipan

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Kearsipan berkaitan dengan upaya perwujudan penataan kearsipan yang teratur dan terstruktur, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi :

1. Penataan kearsipan secara mandiri
2. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan arsip secara digital

URUSAN PILIHAN NON PELAYANAN DASAR

IV.1.2.23 Perikanan

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Perikanan berkaitan dengan peningkatan sistem dan teknologi perikanan, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi :

1. Perubahan pola pencaharian nelayan menjadi pelaku budidaya perikanan darat karena penurunan hasil tangkapan laut
2. Pemanfaatan teknologi untuk menjaga hasil produksi perikanan

IV.1.2.24 Pariwisata

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pariwisata berkaitan dengan kualitas infrastruktur dan utilitas penunjang sektor pariwisata, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:

1. Daya dukung infrastruktur obyek wisata yang menjadi ikon Surabaya
2. Kualitas sarana dan prasarana penunjang obyek pariwisata, khususnya yang dikelola Pemerintah Kota.

IV.1.2.25 Pertanian

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pertanian berkaitan dengan upaya pengembangan sistem pertanian, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:

1. Pengembangan pertanian bernilai tambah tinggi (tanaman hortikultura) dan pemanfaatan teknologi
2. Mengembangkan pertanian sebagai RTH untuk menggantikan nilai ekologis yang hilang akibat alih fungsi lahan pertanian

IV.1.2.26 Perdagangan

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Perdagangan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Pengawasan peredaran barang dan jasa

Permasalahan mengenai peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok;
2. Upaya perlindungan konsumen.

b. Perwujudan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional

Permasalahan mengenai perwujudan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara berkelanjutan;
2. Perluasan jaringan pemasaran;
3. Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional;
4. Aktivitas perdagangan antar pulau dan nasional;
5. Minat masyarakat terhadap produk domestik.

c. Peningkatan kebijakan yang dapat menjalin hubungan antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri

Permasalahan mengenai peningkatan kebijakan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Sinergitas peraturan pusat dan daerah,
2. Proses perijinan masih belum efisien;
3. Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal;
4. Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi hambatan.

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

IV.1.2.27 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan meliputi:

1. Ketepatan Waktu Pelaksanaan kegiatan
2. Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis serta Monitoring dan Evaluasi
3. Kualitas dokumen perencanaan tahunan SKPD

IV.1.2.28 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah meliputi :

1. Kualitas Standar Pelayanan yang tersusun
2. Fungsi evaluasi terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah
3. Kerjasama antar daerah dan luar negeri
4. Pemanfaatan kajian di semua sektor sebagai dasar kebijakan
5. Penyebarluasan dan evaluasi produk hukum daerah

IV.1.2.29 Pengawasan

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pengawasan meliputi :

1. Penanganan Disiplin Aparatur
2. Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan

IV.1.2.30 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan meliputi:

1. Kompetensi SDM aparatur
2. Pengembangan assessment centre

IV.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Isu strategis merupakan penelaahan terhadap permasalahan pembangunan pada level lokal, regional, nasional maupun internasional. Rumusan isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

IV.2.1 Isu Strategis Prioritas Kota Surabaya

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi kota Surabaya seiring dengan dinamika dan pengembangan kota serta menelaah isu-isu di lingkup Propinsi Jawa Timur, Nasional dan global, maka dirumuskan 7 (tujuh) isu strategis kota sebagai berikut:

1. Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global
2. Surabaya sebagai Barometer Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
3. Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi
4. Melestarikan Budaya Lokal untuk Mencegah Pengaruh Budaya yang Negatif
5. Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai Penghubung Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional
6. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global
7. Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

IV.2.1.1 Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global

Isu strategis “Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global“ menyangkut urusan pendidikan dan kesehatan, pangan, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Perumusan isu Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu: Kualitas layanan pendidikan; Ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan; Kerjasama penyelenggaraan pendidikan; Kesehatan lingkungan; Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan; Ketersediaan, standarisasi dan kualitas sarana prasarana serta tata kelola layanan kesehatan; Ketersediaan dan kualitas konsusmsi pangan masyarakat; Peran pemuda sebagai penggerak pembangunan dan capaian prestasi olahraga; Kualitas angkatan kerja yang berkarakter dan berdaya saing global, khususnya pada aspek peningkatan daya saing angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis; Penanganan PMKS, pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

IV.2.1.2 Surabaya sebagai Barometer Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum

Isu strategis “Surabaya sebagai barometer stabilitas keamanan dan ketertiban umum“ menyangkut urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Perumusan isu Surabaya sebagai barometer stabilitas keamanan dan ketertiban umum merupakan hasil penelaahan terhadap permasalahan Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sebagai sendi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada aspek perwujudan kerjasama di lingkup RT/RW untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban serta membangkitkan karakter peduli, toleransi, menghargai dan gotong royong.

IV.2.1.3 Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi

Isu strategis “Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi“ menyangkut urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral.

Perumusan isu Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu : Kualitas penataan ruang dan pertanahan, khususnya pada aspek penyusunan rencana tata ruang yang dapat menjadi pedoman pembangunan kota serta penyediaan lahan aset bagi kepentingan umum; Sistem penanggulangan bencana kawasan perkotaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang mencakup sistem penanggulangan bencana kebakaran, sistem pengelolaan dan pengolahan sampah baik skala kota maupun regional, pengelolaan RTH, pengendalian pencemaran lingkungan; Perumahan dan permukiman yang layak dan berkualitas, khususnya pada aspek layanan sarana dan prasarana pada perumahan dan permukiman untuk mendukung universal access pemenuhan target 0% permukiman kumuh dan 100 % sanitasi; Pemanfaatan energi secara efektif dan efisien, khususnya pada aspek konservasi energi dan pengembangan energi alternatif, penyediaan infrastruktur berbasis ekologi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

IV.2.1.4 Melestarikan Budaya Lokal untuk Mencegah Pengaruh Budaya yang Negatif

Isu strategis “Melestarikan budaya lokal untuk mencegah pengaruh budaya yang negatif” menyangkut urusan perpustakaan dan kebudayaan.

Perumusan isu Melestarikan budaya lokal untuk mencegah pengaruh budaya yang negatif merupakan hasil penelaahan terhadap permasalahan Penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal, termasuk upaya peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.

IV.2.1.5 Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai Penghubung Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional

Isu strategis “Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional” menyangkut urusan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan; pertanian, pariwisata, dan penanaman modal.

Perumusan isu Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu : Pengembangan Surabaya sebagai penghubung perdagangan/jasa antar pulau, nasional dan regional, khususnya pada aspek penciptaan hubungan strategis antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan dan industri; Pembangunan dan pengembangan sistem transportasi, khususnya pada aspek penciptaan sistem manajemen transportasi yang berkualitas; Peningkatan kinerja dan daya saing aktivitas ekonomi lokal, khususnya pada aspek peningkatan volume usaha UMKM serta kualitas kelembagaan koperasi, Pengembangan pertanian bernilai tambah tinggi (tanaman hortikultura) dan pemanfaatan teknologi; Pengembangkan pertanian sebagai RTH untuk menggantikan nilai ekologis yang hilang akibat alih fungsi lahan pertanian; Perubahan pola pencaharian nelayan menjadi pelaku budidaya perikanan darat karena penurunan hasil tangkapan laut; Pemanfaatan teknologi untuk menjaga hasil produksi perikanan; Pengawasan peredaran barang dan jasa; Peningkatan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah; Peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas penunjang sektor pariwisata.

IV.2.1.6 Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global

Isu strategis “Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global” menyangkut urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, teknologi Informasi dan Komunikasi.

Perumusan isu Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu : Pembangunan dan pengembangan sistem transportasi, khususnya pada aspek Pengembangan sistem angkutan masal cepat perkotaan secara terpadu dan terintegrasi antar moda serta penyediaan dan penuntasan jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan kapasitas jalan

secara memadai; Pembangunan sarana prasarana pematusan; Peningkatan pelayanan utilitas kota, khususnya pada aspek Pelayanan air bersih melalui pemenuhan kapasitas produksi dengan optimalisasi *idle capacity* dan penurunan kebocoran pada pemanfaatan sumber air baku kali surabaya, mata air umbulan dan pandaan untuk mendukung *universal access* pemenuhan target 100 % pelayanan air bersih, Pengembangan utilitas penerangan jalan umum dan utilitas kota lainnya.

IV.2.1.7 Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Isu strategis “Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik” menyangkut urusan komunikasi dan informatika, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Statistik, Kearsipan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan, Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah, Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

Perumusan isu Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hasil penelaahan terhadap permasalahan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, khususnya pada aspek penyediaan layanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, penyediaan infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik, perwujudan tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan,serta peningkatan sistem administrasi kependudukan, Penyediaan data statistik daerah (kota) yang dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan update; Kompetensi SDM aparatur; Pengembangan assessment centre; Penanganan Disiplin Aparatur; Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan; Kualitas Standar Pelayanan yang tersusun; Fungsi evaluasi terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah; Kerjasama antar daerah dan luar negeri; Pemanfaatan kajian di semua sektor sebagai dasar kebijakan; Penyebarluasan dan evaluasi produk hukum daerah; Ketepatan Waktu Pelaksanaan kegiatan; Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis serta Monitoring dan Evaluasi; Kualitas dokumen perencanaan tahunan SKPD.

IV.2.2 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu-isu strategis yang telah diuraikan di atas menurunkan tujuan, sasaran dan program RPJMD. Program-program tersebut akan dinilai kelayakannya dengan menggunakan isu-isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penataan dan perbaikan kawasan permukiman kumuh dan pinggiran kota serta penyediaan rumah tinggal yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. Meningkatnya ancaman intrusi air laut ke daerah perkotaan;
3. Tingginya tingkat pencemaran air sungai yang dapat mengancam penyediaan sumber air baku;
4. Meningkatnya ancaman penurunan kualitas kawasan pesisir;
5. Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim;
6. Belum terintegrasinya jaringan infrastruktur perkotaan dan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) terutama terhadap perkembangan kawasan permukiman, perdagangan jasa dan industri;
7. Belum optimalnya kinerja sistem transportasi yang terkait jaringan jalan, layanan angkutan publik, serta optimlaisasi jalur barang dan orang;
8. Belum optimalnya implementasi penataan ruang;
9. Perlu peningkatan upaya sistem mitigasi bencana dan penanggulangan terhadap bencana banjir, kebakaran dan bencana sosial;
10. Kurangnya peningkatan upaya konservasi energi dan pemanfaatan potensi energi alternatif dari berbagai sumber;
11. Belum optimalnya kontribusi dunia usaha didalam pembentukan pendapatan daerah;
12. Rendahnya daya saing usaha pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) serta membanjirnya produk substitusi impor dengan harga yang lebih kompetitif;
13. Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pariwisata yang menjadi ciri khas Kota Surabaya;

14. Belum optimalnya pendidikan karakter untuk mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh budaya asing;
15. Meningkatnya kasus/penyakit degeneratif yang disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpola hidup sehat;
16. Makin banyaknya penduduk kota yang bermasalah secara sosial karena tekanan hidup kawasan urban;
17. Adanya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak.

IV.2.3 Isu Strategis Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Selain merupakan hasil penelaahan terhadap dinamika pembangunan yang terjadi di skala kota, penetapan isu strategis Kota Surabaya juga mengacu kepada isu-isu yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta mempunyai relevansi dengan kondisi dan pengembangan Kota Surabaya.

IV.2.3.1Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009-2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan" seperti terlihat pada grafik berikut:

Gambar IV.1
Grafik Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

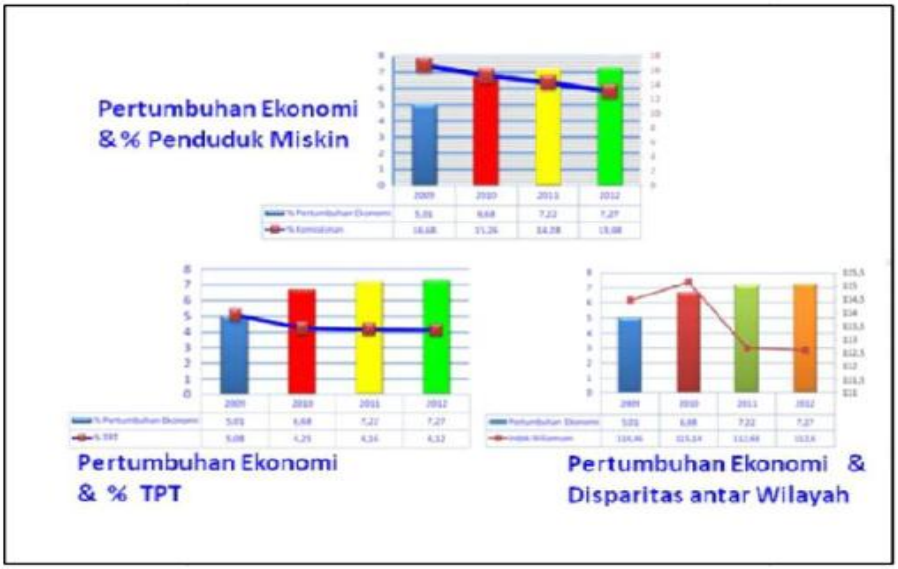

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019

IV.2.3.2 Ketimpangan Wilayah

Disparitas wilayah dapat dilihat dari PDRB Perkapita kabupaten atau kota di lingkup Provinsi Jawa Timur. Kabupaten atau Kota yang memiliki PDRB perkapita tinggi meliputi Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang. Adapun Kabupaten atau Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita rendah meliputi Pacitan, Trenggalek,Ponorogo, Bondowoso, Jember, dan Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

IV.2.3.3 Kerjasama Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, hal ini meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dan mengembangkan potensi daerah dengan lebih optimal. Disamping itu dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan baik keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menghadapi perekonomian global maka kerjasama daerah dengan Luar Negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor

maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah juga tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

IV.2.4 Isu Nasional dan Global dan Keterkaitannya dengan Visi Kota Surabaya

Tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*) yang mulai dijalankan sejak tahun 2000, telah berakhir pada tahun 2015. Sejak 2016 *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicetuskan untuk meneruskan MDGs agar lebih terarah dan berkelanjutan. SDGs diharapkan dapat dicapai pada tahun 2031 dan memiliki 5 pondasi utama meliputi: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan dengan 17 target sasaran utama, yaitu:

1. **Tanpa Kemiskinan**

   Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. **Tanpa Kelaparan**

   Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. **Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan**

   Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. **Pendidikan Berkualitas**

   Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. **Kesetaraan Gender**

   Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. **Air Bersih dan Sanitasi**

   Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. **Energi Bersih dan Terjangkau**

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak**

   Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

   Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. **Mengurangi Kesenjangan**

    Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. **Keberlanjutan Kota dan Komunitas**

    Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.

12. **Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab**

    Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. **Aksi Terhadap Iklim**

    Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. **Kehidupan Bawah Laut**

    Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. **Kehidupan di Darat**

    Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. **Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian**

    Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Hal terpenting bagi kota-kota di dunia termasuk Surabaya dalam pencapaian SDGs adalah sasaran yang ke-11 yaitu bagaimana membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Namun demikian sasaran-sasaran yang lain akan disinkronkan dengan isu-isu strategis yang digali dari permasalahan pembangunan di Kota Surabaya.

Gambar IV.2
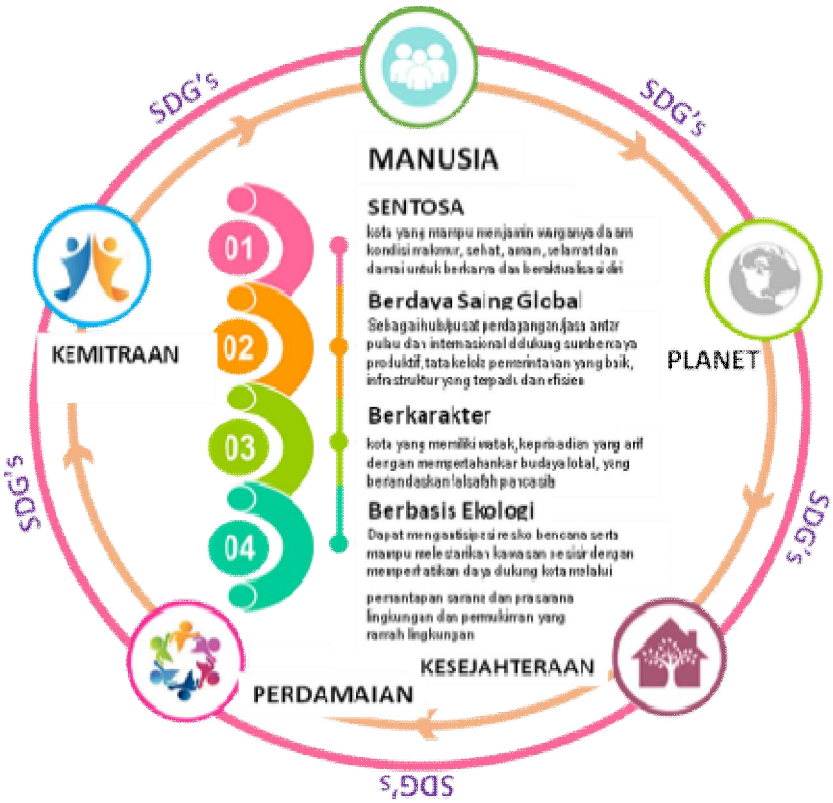
Keterkaitan SDG's dengan Visi Kota Surabaya